

LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Nelson

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Nelson

Abstract.

Law enforcement in Indonesia has been under intense scrutiny in recent years, especially in relation to the rise in corruption cases and injustice in handling cases involving the lower middle class. One of the fundamental problems that continues to haunt the Indonesian justice system is the high level of corruption among government officials and law enforcement agencies. Corruption cases involving political and bureaucratic elites often experience slow and selective legal processes, raising doubts about the effectiveness of law enforcement. Therefore, a more in-depth analysis of the causes and solutions to the problem of weak law enforcement in Indonesia is needed. This is useful for improving the integrity of the legal system and law enforcement officials in Indonesia. This research will use qualitative methods based entirely on references from previous research to investigate weak law enforcement in Indonesia. Qualitative research methods were chosen because they allow researchers to gain an in-depth understanding of the context, dynamics and complexity of weak law enforcement, while accommodating a flexible analytical framework. In conclusion, this research reveals the complexity of weak law enforcement in Indonesia, especially related to corruption, political intervention, structural weaknesses, inequality in the judiciary, and cultural factors. Concrete steps are needed to improve the integrity of law enforcement, including eradicating corruption, increasing the independence of legal institutions, structural improvements, and increasing transparency.

Keywords: corruption, political intervention, structural weaknesses, inequality in the judiciary, and cultural factors

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi sorotan intensif dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan maraknya kasus korupsi dan ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kaum menengah ke bawah. Salah satu permasalahan mendasar yang terus menghantui sistem peradilan Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dan lembaga-lembaga penegak hukum. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan birokrasi seringkali mengalami proses hukum yang lamban dan terkesan selektif, menimbulkan keraguan akan efektivitas penegakan hukum (Setiadi, 2018).

Keadaan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dalam sistem hukum, yang menciptakan celah untuk praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun berbagai upaya reformasi telah

dilakukan, namun masih terlihat kendala-kendala struktural dan budaya yang membuat proses penegakan hukum terhambat. Dalam konteks ini, perluasan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak selalu diiringi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas, melainkan dapat menjadi sumber potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga termanifestasi dalam perlakuan yang tidak proporsional terhadap kaum menengah ke bawah. Banyaknya kasus di mana masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang lemah mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan para pelaku kejahatan korporasi atau pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, menciptakan kesan bahwa sistem peradilan cenderung memberatkan mereka yang kurang berdaya.

Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam akses terhadap keadilan, di mana masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seringkali kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah-daerah terpencil semakin memperburuk disparitas ini. Sebagai akibatnya, banyak individu dari kelompok rentan yang tidak mampu membela hak-hak mereka secara efektif di pengadilan.

Selain aspek ketidaksetaraan ekonomi, adanya praktik-praktik diskriminatif dalam penanganan kasus-kasus hukum juga menjadi perhatian serius. Beberapa elemen masyarakat, terutama minoritas etnis dan agama, sering mengalami perlakuan yang tidak adil di dalam sistem peradilan. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu dapat memengaruhi keputusan-keputusan hukum, merugikan hak-hak individu dan merusak integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang penyebab dan juga solusi dari permasalahan lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini. Hal itu berguna untuk meningkatkan integritas sistem hukum dan juga aparat penegak hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan sepenuhnya pada rujukan dari penelitian terdahulu untuk menyelidiki lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, dinamika, dan kompleksitas lemahnya penegakan hukum, sambil mengakomodasi kerangka analisis yang bersifat fleksibel.

Penelitian kualitatif, dalam konteks ini, melibatkan analisis mendalam terhadap literatur penelitian yang telah ada. Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan untuk memahami sejauh mana lemahnya penegakan hukum di Indonesia memengaruhi stabilitas sistem hukum dan keadilan. Salah

satu fokus utama penelitian ini adalah merinci faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, serta mengidentifikasi potensi solusi atau rekomendasi perbaikan.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti peran korupsi dalam merusak integritas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian oleh (Arfiani, 2019) menunjukkan bahwa korupsi di tingkat birokrasi dan dalam tubuh penegak hukum sendiri telah merongrong fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Keberhasilan kasus-kasus penegakan hukum sering kali terhambat oleh intervensi politik dan praktik-praktik korupsi yang memuluskan jalan bagi pelanggaran hukum yang tidak dihukumkan dengan tegas.

Pentingnya independensi lembaga-lembaga penegak hukum juga menjadi sorotan dalam penelitian terdahulu. Penelitian oleh (Tanjung & Purwadi, 2019) menyoroti bahwa ketidakmandirian Kepolisian dan Kejaksaan, serta pengaruh politik yang kuat, telah menghambat proses penegakan hukum. Interaksi antara politik dan penegakan hukum sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap kasus-kasus tertentu, di mana pelanggaran yang melibatkan elit politik sering kali dihadapi dengan penanganan yang kurang tegas.

Penelitian terdahulu juga menyoroti tantangan dalam sistem peradilan Indonesia. Keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan infrastruktur, telah menciptakan hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Analisis oleh (Sulaiman, 2018) menunjukkan bahwa penanganan kasus yang lambat dan keterbatasan dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum.

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan mendalam tentang dampak lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat. Masyarakat dari kalangan menengah ke bawah seringkali menjadi korban utama dari ketidakadilan ini. Kasus-kasus di mana pelaku kejahatan korporasi atau pejabat tinggi terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat sering kali mendapatkan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan kasus-kasus kecil yang melibatkan individu dari lapisan ekonomi yang lebih rendah. Analisis ini membawa kita pada kesimpulan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Penelitian terdahulu juga memberikan wawasan tentang faktor budaya yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum. Budaya "patron-client" yang mendasari hubungan antara pemimpin politik dan aparat penegak hukum telah menciptakan dinamika yang merugikan integritas penegakan hukum (Ketaren,

2023). Koneksi personal dan afiliasi politik seringkali lebih berpengaruh daripada prinsip-prinsip hukum dalam menentukan jalannya suatu kasus.

Dalam konteks ini, penelitian terdahulu membuka pintu bagi pembahasan mengenai solusi atau perbaikan potensial. Harus ditekankan pentingnya reformasi struktural dalam memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum adalah beberapa rekomendasi yang muncul dari literatur penelitian.

Untuk menyimpulkan, penelitian ini akan menggali lebih dalam pemahaman tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia dengan mengandalkan rujukan dari penelitian terdahulu. Dengan merinci faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, dampaknya terhadap masyarakat, dan potensi solusi atau perbaikan, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman dan perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, diharapkan dapat dirancang langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Lemahnya Hukum di Indonesia

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai faktor dari berbagai lapisan masyarakat dan struktur pemerintahan. Penyebab lemahnya penegakan hukum dapat ditemukan dalam kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk lingkungan di mana lemahnya penegakan hukum dapat berkembang. Beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, dan faktor budaya yang memengaruhi independensi penegak hukum.

Korupsi menjadi salah satu faktor sentral yang merongrong integritas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi telah meresap dalam berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Praktik korupsi ini menciptakan lingkungan di mana hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pejabat-pejabat yang seharusnya bertugas memberlakukan hukum terkadang terlibat dalam tindakan korupsi, sehingga menghambat proses penegakan hukum yang adil dan tegas.

Intervensi politik juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberlanjutan penegakan hukum sering kali tergantung pada

kepentingan politik, di mana kasus-kasus dapat dihentikan atau diarahkan sesuai dengan preferensi politik tertentu. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pelanggaran hukum, terutama ketika pelaku kejahatan berasal dari kalangan politik atau memiliki koneksi yang kuat dengan elite politik. Intervensi politik merusak independensi lembaga penegak hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Kelemahan struktural dalam lembaga penegak hukum juga menjadi penyebab signifikan lemahnya penegakan hukum (Adnani, 2020). Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai dua institusi kunci dalam penegakan hukum, sering menghadapi tantangan dalam hal kurangnya sumber daya, baik dari segi personel maupun infrastruktur. Keterbatasan ini menciptakan hambatan praktis dalam penyelidikan dan penanganan kasus-kasus, menyebabkan proses hukum menjadi lamban dan kurang efektif. Upaya reformasi untuk memperkuat kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini masih menjadi tuntutan mendesak.

Ketidaksetaraan dalam sistem peradilan turut menyumbang pada lemahnya penegakan hukum di Indonesia (Lakoro et al., 2020). Kasus-kasus seringkali ditangani dengan cara yang tidak proporsional, di mana pelaku kejahatan dari kalangan menengah ke bawah seringkali mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan korporasi atau pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi. Ketidaksetaraan ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, terutama di kalangan masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan setara.

Faktor budaya juga memberikan kontribusi pada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Budaya "patron-client" yang menguat dalam hubungan antara pemimpin politik dan aparat penegak hukum menciptakan dinamika di mana keputusan-keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh hubungan personal dan afiliasi politik. Independensi penegak hukum sering kali terancam oleh hubungan patron-klien ini, yang menyulitkan terciptanya penegakan hukum yang netral dan objektif.

Dalam mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia, perlu diambil langkah-langkah konkret. Pertama-tama, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Reformasi kebijakan untuk mengurangi intervensi politik dalam penegakan hukum dan memperkuat independensi lembaga penegak hukum juga menjadi langkah mendesak (Adnani, 2020).

Selanjutnya, perbaikan struktural dalam lembaga penegak hukum perlu dilakukan. Penyediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun infrastruktur, harus menjadi fokus. Peningkatan pelatihan dan

kapasitas aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani berbagai jenis kasus.

Sistem peradilan juga harus diperkuat untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil kepada semua lapisan masyarakat adalah langkah yang sangat penting. Penguatan budaya hukum yang menekankan pentingnya independensi dan integritas penegak hukum juga perlu diperhatikan.

Langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara holistik dan berkesinambungan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan di mana keadilan, transparansi, dan integritas menjadi pondasi utama dalam penegakan hukum. Dengan melakukan perubahan dalam beberapa aspek yang saling terkait, Indonesia dapat membangun sistem penegakan hukum yang lebih kuat, adil, dan dapat dipercaya bagi semua warganya.

Langkah Solusi yang Harus Dilakukan

Meningkatkan integritas penegakan hukum di Indonesia merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat sipil. Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkrit perlu diambil oleh aparat penegak hukum. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan keahlian teknis harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum perlu memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka, serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan perkembangan terkini dalam bidangnya.

Selain peningkatan kapasitas individu, perbaikan dalam manajemen internal lembaga penegak hukum juga sangat penting. Sistem manajemen yang baik dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa kebijakan internal sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Mekanisme pengawasan internal yang kuat dapat menjadi alat efektif untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang tidak etis. Aparat penegak hukum perlu secara aktif melibatkan diri dalam pengembangan dan penerapan standar etika yang tinggi, serta menegakkan disiplin internal secara konsisten.

Selanjutnya, independensi lembaga penegak hukum harus diperkuat. Upaya untuk mengurangi intervensi politik dan memastikan bahwa keputusan

hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal adalah kunci dalam meningkatkan integritas penegakan hukum. Diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung independensi lembaga penegak hukum, seperti peninjauan ulang prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta peningkatan mekanisme perlindungan terhadap intervensi politik.

Transparansi juga merupakan elemen kunci dalam membangun integritas penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu terbuka terhadap publik mengenai tindakan dan keputusan mereka. Peningkatan akses informasi, termasuk pengungkapan kekayaan pejabat penegak hukum, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, penciptaan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif dapat memberikan insentif kepada anggota aparat penegak hukum untuk mengungkapkan perilaku korup atau tidak etis tanpa takut represalias.

Untuk memperkuat integritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi di internal lembaga penegak hukum adalah langkah krusial. Implementasi sistem pengendalian internal yang ketat, pemberlakuan audit internal secara berkala, dan pelibatan auditor independen dapat membantu mendeteksi dan mencegah korupsi. Pembentukan tim independen untuk menyelidiki dan menangani dugaan korupsi internal dapat menunjukkan komitmen serius terhadap kebersihan institusi.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Aparat penegak hukum perlu aktif terlibat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan merespons masukan serta keluhan. Mekanisme umpan balik dari masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk memeriksa kinerja dan integritas lembaga penegak hukum. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan dan hak-hak mereka.

Membangun kerja sama regional dan internasional juga dapat memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia. Pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga penegak hukum. Keanggotaan dalam organisasi internasional yang fokus pada penegakan hukum, seperti Interpol atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dapat memberikan akses ke sumber daya dan dukungan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum Indonesia.

Selain itu, perlu ada upaya untuk mendigitalisasi proses penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Aplikasi teknologi dapat digunakan untuk mengelola data, mempercepat proses investigasi, dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat diakses dengan cepat. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana whistleblower

atau pemberi informasi dapat melaporkan dugaan pelanggaran hukum tanpa takut akan represalias. Perlindungan hukum yang memadai harus disediakan untuk mereka yang melaporkan tindakan korup atau perilaku tidak etis. Langkah-langkah seperti itu akan menciptakan budaya yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum.

Selanjutnya, peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum juga menjadi kunci. Kolaborasi yang erat antara kepolisian, jaksa, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan mulus. Pertukaran informasi yang efektif dan koordinasi yang baik akan meningkatkan efisiensi dan hasil dari upaya penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan komitmen politik. Reformasi struktural dan kebijakan yang mendukung independensi lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberantasan korupsi harus didukung oleh keputusan dan tindakan pemerintah

Masyarakat Indonesia memiliki peran krusial dalam meningkatkan integritas penegakan hukum di negara ini. Melibatkan diri secara aktif dan kritis dalam proses penegakan hukum adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Pertama-tama, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye informasi. Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum, proses peradilan, dan peran lembaga penegak hukum akan memberikan pondasi yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam memastikan integritas penegakan hukum. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum. Pemberdayaan warga untuk menjadi mata dan telinga yang waspada dapat membantu mendeteksi tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Penciptaan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga integritas penegakan hukum.

Selain itu, masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam advokasi dan kampanye untuk reformasi hukum. Mendukung perubahan kebijakan yang bertujuan memperkuat independensi lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi, dan mengurangi intervensi politik merupakan langkah yang dapat diambil oleh masyarakat. Partisipasi dalam aksi-aksi sipil dan gerakan masyarakat sipil juga dapat menjadi dorongan untuk perubahan positif dalam sistem penegakan hukum. Pendidikan hukum di tingkat masyarakat juga merupakan aspek penting. Masyarakat perlu memahami dasar-dasar hukum dan hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses penegakan hukum. Inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui program-program pelatihan

hukum dan penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran akan peran kritis masyarakat dalam menjaga integritas penegakan hukum.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum juga dapat berdampak besar pada integritas penegakan hukum. Memilih pemimpin yang berkomitmen untuk memberantas korupsi, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mempromosikan keadilan dapat membentuk arah kebijakan yang mendukung integritas penegakan hukum. Masyarakat dapat melakukan penilaian yang cermat terhadap calon-calon yang diusung dan memilih mereka yang memiliki rekam jejak integritas dan komitmen terhadap perbaikan sistem hukum. Selain itu, membentuk kelompok advokasi dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk bersatu dalam mendukung reformasi penegakan hukum. Kolaborasi dan koordinasi antar-organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan tekanan publik yang lebih kuat, memaksa pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat akan perubahan positif dalam sistem penegakan hukum. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai aspek ini, masyarakat Indonesia dapat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan integritas penegakan hukum. Melalui kesadaran, partisipasi, dan aksi konkret, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat fondasi keadilan dan integritas di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan, penelitian ini mengungkap kompleksitas lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural, ketidaksetaraan dalam peradilan, dan faktor budaya. Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan integritas penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, peningkatan independensi lembaga hukum, perbaikan struktural, dan peningkatan transparansi. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan independensinya, sementara masyarakat dapat berperan aktif melalui pendidikan hukum, partisipasi dalam pemilihan, dan advokasi reformasi hukum. Kerjasama regional, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat fondasi keadilan dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Dengan langkah-langkah holistik ini, diharapkan dapat terwujud sistem penegakan hukum yang lebih kuat, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, A. (2020). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia Dari Sudut Pandang Struktural. *Ensiklopedia Of Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33559/Eoj.V2i2.418>
- Arfiani, H. (2019). *Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya*.

- Ketaren, S. R. A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), Article 01. <https://doi.org/10.33756/Jelta.V13i01.7304>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), Article 3. <https://doi.org/10.54629/Jli.V15i3.234>
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma Dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/Kanun.V20i2.10076>
- Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Volume*, 7(1).